

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA

(ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE OPEN UNEMPLOYMENT RATE IN INDONESIA)

Zihan Ramadina, Yesi Aprianti

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Mulawarman.

Samarinda-Indonesia

Email: yesi.aprianti@feb.unmul.ac.id

Diterima: 28 Mei 2026; Direvisi: 29 Juni 2026; Disetujui: 2 Juli 2026

ABSTRAK

Data BPS masih menunjukkan sebaran tidak merata pada pengangguran di Indonesia, dimana tidak hanya di wilayah Jawa, TPT tinggi juga ditemukan pada wilayah Sumatera (Riau) dan Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, TPAK, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan metode analisis data panel pada periode 2018 sampai dengan 2025 dari 34 Provinsi di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Adapun dari hasil penelitian ini diketahui bahwa secara statistik tidak ditemukan pengaruh antara PDRB dan TPT, namun memiliki hubungan yang negatif. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas di Indonesia juga didominasi oleh akumulasi modal (padat modal), namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut. TPAK dan UMP memiliki pengaruh dan hubungan negatif dengan TPT, sehingga bertambahnya partisipasi tenaga kerja dan kenaikan upah dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal menarik adalah ditemukannya hubungan atau pengaruh positif antara tingkat pendidikan dengan TPT yang mengindikasikan terdapat fenomena pekerja tidak terdidik yang terserap ke pasar kerja.

Kata kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan

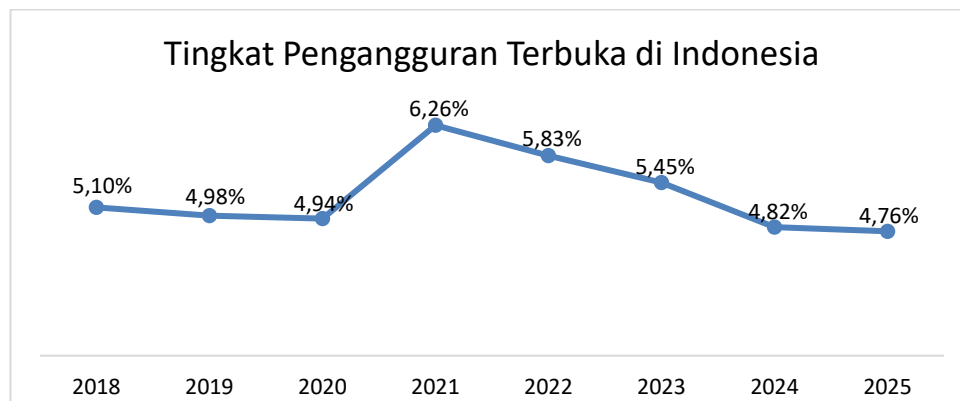
ABSTRACT

Data from the Central Statistics Agency (BPS) still shows an uneven distribution of unemployment in Indonesia, where high unemployment rates (TPT) are also found not only in Java but also in Sumatra (Riau) and Papua. This study aims to analyze the influence of GRDP, TPAK, provincial minimum wages, and education levels on the open unemployment rate in Indonesia. This study uses a multiple linear regression model with a panel data analysis method for the period 2018 to 2025 from 34 provinces in Indonesia sourced from the Indonesian Central Statistics Agency. The results of this study indicate that statistically there is no influence between GRDP and TPT, but there is a negative relationship. This explains that the increase in productivity in Indonesia is also dominated by capital accumulation (capital-intensive), but this requires further study. TPAK and UMP have a negative influence and relationship with TPT, so that increased labor participation and wage increases can reduce the number of unemployed in Indonesia. Interestingly, the discovery of a positive relationship or influence between education level and TPT indicates the phenomenon of uneducated workers being absorbed into the labor market..

Keywords: Open Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Product, Labor Force Participation Rate, Minimum Wage, Education Level

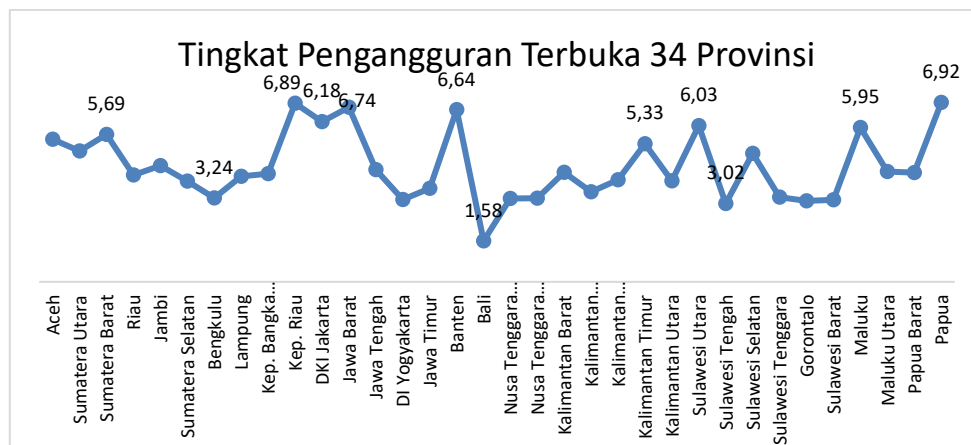
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki beragam permasalahan ekonomi, salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai adalah pengangguran. Secara global, pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan (Komlos, 2021). Di Indonesia, pengangguran dipandang sebagai masalah yang sangat rumit karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain (Salsabella et al., 2020). Sehingga, jika pengangguran tidak segera diatasi maka akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sosial serta berakibat kemiskinan. Ketidakseimbangan antara pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan lapangan pekerjaan menjadi akar permasalahan dari tingginya angka pengangguran. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar sumber daya manusia berusia produktif menjadi pengangguran, sehingga kontribusi dan produktivitas mereka tidak dapat tercapai secara optimal (Salsabila et al., 2025).



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2018-2025
 Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Diolah Peneliti (2026)

Grafik tingkat pengangguran Indonesia periode 2018–2025 menunjukkan lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Kebijakan karantina dan pembatasan sosial secara signifikan menekan peluang kerja dan memperluas angka pengangguran. Pada tahun tersebut, tiga provinsi mencatatkan TPT tertinggi sekaligus mengalami lonjakan pertumbuhan TPT yang besar, yaitu Kepulauan Riau (10,12%), DKI Jakarta (TPT 8,51%), dan Sulawesi Utara (TPT 7,28%). Dengan pertumbuhan TPT masing-masing sebesar 4,14%, 3,36%, dan 1,94%. Kondisi ini menunjukan sebaran TPT di Indonesia yang belum merata, diperkuat dengan data sebagai berikut.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2025
 Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Diolah Peneliti (2026)

BPS mencatat TPT pada level Provinsi di Indonesia pada tahun 2025 masih terjadi ketimpangan tingkat pengangguran, dimana sebarang TPT tertinggi berada dipulau jawa dan pada beberapa wilayah lainnya. Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi dibandingkan rata rata nasional adalah Provinsi Papua, yaitu sebesar 6,92%, sedangkan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka lebih rendah dibanding rata rata nasional adalah Provinsi Bali, yaitu sebesar 1,58%. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas kondisi ketenagakerjaan antar wilayah di Indonesia. Secara makro, kondisi ini membantah prespektif bahwa wilayah jawa mampu menyediakan lapangan kerja lebih banyak dibanding wilayah di Indonesia bagian timur. Hal ini sejalan dengan fenomena penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yang menunjukan penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih sangat dinamis (Hawari & Siregar, 2026; Tamba & Aprianti, 2025).

Kajian tentang fenomena pengangguran di Indonesia masih menjadi topik dalam berbagai prespektif. (Yoana et al., 2024) mengemukakan bahwa penduduk dengan latar belakang pendidikan kejuruan memiliki probabilitas pengangguran lebih rendah. Di satu sisi, ditemukan bahwa PDRB, tingkat pendidikan, dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Hawariyuni & Andrasari, 2022; Suhadi & Setyowati, 2022). Sedangkan (Fathul Muin, 2020) menyatakan pendidikan berpengaruh, namun PDRB tidak berpengaruh pada pengangguran. Terdapat pula penelitian lain menyatakan bahwa TPAK memiliki pengaruh negatif signifikan dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Salsabila et al., 2025).

Naiknya PDRB mencerminkan meningkatnya nilai tambah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan tersebut mendorong permintaan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja (Suhadi & Setyowati, 2022). Hubungan antara PDRB dan pengangguran terlihat dari kenyataan bahwa peningkatan PDRB di suatu negara mendorong masuknya modal dalam jumlah besar. Hal ini membuka lebih banyak kesempatan kerja, terutama melalui munculnya sektor usaha baru yang berbasis padat karya, sehingga berkontribusi pada penurunan angka pengangguran (Hasan & Sasana, 2020; Prawira, 2018). Artinya, apabila PDRB mengalami peningkatan maka tingkat pengangguran terbuka akan cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya penggunaan variabel TPAK juga digunakan untuk memproyeksikan kondisi ekonomi. Semakin meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja, maka hasil produksi akan meningkat pula, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Lestari & Nilasari, 2025) yang pada akhirnya menurunkan pengangguran. Dengan tersedianya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja tersebut, tingkat pengangguran terbuka pun akan cenderung mengalami penurunan (Salsabila et al., 2025).

Berdasarkan teori pengangguran oleh Keynesian, menegaskan bahwa pengangguran timbul akibat kurangnya suatu permintaan agregat, yaitu total permintaan barang dan jasa di dalam perekonomian (Mukhyi, 2024). Kemudian, Upah Efisiensi (*Efficiency Wage*) yang dicetuskan oleh N. Gregory Mankiw mengemukakan bahwa upah yang tinggi dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam hal ini, memperjelas bahwa tingkat pengangguran dapat ditekan dengan meningkatkan upah pekerja (Mankiw, 2016). Sedangkan teori Human Capital oleh Gary Becker, menyatakan bahwa pencapaian pendidikan, pengalaman kerja, serta kualitas pribadi lainnya yang mempengaruhi produktivitasnya di tempat kerja (Harahap, 2024).

Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pendidikan memproyeksikan kondisi permintaan agregat tenaga kerja sesuai teori Keynesian. Dalam analisis Mankiw mengenai pasar tenaga kerja, penerapan upah efisiensi berkontribusi pada penurunan perputaran tenaga kerja secara signifikan (Mankiw, 2016) dan mendukung terciptanya

kesempatan kerja (Wahyudi et al., 2023), dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat meningkatkan peluang bekerja (Hartanto & Masjkuri, 2017; Suhadi & Setyowati, 2022). Dengan lingkup data provinsi di Indonesia, tujuan penelitian adalah memberikan pengujian secara lebih komprehensif terhadap variabel untuk mengatasi pengangguran.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB (X1), TPAK (X2), Upah Minimum Provinsi (X3), dan RLS (X4) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi data panel selama 8 tahun dari periode 2018-2025 pada 34 provinsi di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, sehingga total observasi dalam penelitian ini berjumlah 272 observasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *EViews* 12 untuk mengestimasi model regresi data panel. Dengan persamaan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* (data 34 Provinsi di Indonesia). Pemilihan 34 Provinsi merupakan provinsi yang telah memiliki data lengkap sejak 2018. Analisis ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda guna menguji dan membuktikan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun secara parsial.

Tahap awal penelitian ini dilakukan dengan memilih model terbaik yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu dengan melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari normalitas data, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi linear (Arisandi, 2022). Setelah itu melakukan pengujian kelayakan model yang terdiri dari uji simultan (F) dan uji koefisien determinasi (R²), dan dilanjut melakukan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis data panel, pertama yaitu melakukan pemilihan model terbaik melalui uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Terdapat tiga model dalam mengestimasi model regresi data panel, diantaranya adalah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dari hasil pengujian uji *Chow*, nilai Prob. Chi-square menunjukkan nilai sebesar 0,0000 < 0,05 yang artinya model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Maka dari itu perlu dilanjutkan untuk melakukan uji *Hausman*. Kemudian, dari hasil uji *Hausman*, didapatkan bahwa nilai Prob. Chi-square adalah sebesar 0,0005 < 0,05 yang artinya model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) (Basuki, 2021). Maka, uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu dilakukan.

Tabel 1. Hasil Model Analisis Data Panel

Keterangan	Prob	Keputusan
Uji <i>Chow</i>	0,0000	FEM
Uji <i>Hausman</i>	0,0005	FEM

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews* 12 (2026)

Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Normalitas data dilakukan dengan uji normalitas dengan teknik *Jarque Bera Test* (*J-B Test*) dengan ketentuan data normal jika nilai probabilitas *Jarque Bera* > 0,05 (Basuki, 2021). Mengacu pada tabel 2, nilai Probabilitas *Jarque Bera* sebesar 0,051143 > 0,05 sehingga data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Prob
<i>Jarque Bera Probability</i>	0,051143

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 12* (2026)

Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas melalui koefisien korelasi antara variabel independen, jika nilai korelasi antar variabel lebih rendah dari 0.8 maka tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen, begitu pun sebaliknya (Sihabudin et al., 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji *Correlation Matrix* yang terdapat pada aplikasi *Eviews 12*. Merujuk pada tabel 3, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen adalah $< 0,70$ maka dapat dinyatakan data variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	PDRB	TPAK	UMP	RLS
PDRB	1,000000	-0,128127	-0,083817	0,204060
TPAK	-0,128127	1,000000	-0,346931	-0,444547
UMP	-0,083817	-0,346931	1,000000	0,424455
RLS	0,204060	-0,444547	0,424455	1,000000

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 12* (2026)

Kemudian dilanjut dengan melakukan uji heterokedastitas yang bertujuan untuk menilai apakah terdapat variasi yang tidak konsisten oleh residual pada semua pengamatan dalam suatu model regresi. Penelitian menggunakan uji *Glejser* untuk mengetahui apakah terdapat gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini. Data akan dikatakan tidak terdeteksi heterokedastisitas jika nilai probabilitas $> 0,05$ (Winarno, 2017). Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa besaran dari nilai probabilitas secara keseluruhan variabel menyatakan lebih besar dari 0,05 sehingga data yang digunakan tidak terdeteksi adanya gejala heterokedastisitas (Winarno, 2017).

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Prob
PDRB	0,8057
TPAK	0,0565
UMP	0,1296
RLS	0,1977

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 12* (2026)

Pengujian terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji autokorelasi. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi serial yang merujuk pada hubungan korelasi antara seri data sebelumnya dengan data berikutnya dalam data yang diatur berdasarkan urutan waktu (*time series*) (Sihabudin et al., 2021). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi akan dilakukan menggunakan uji *Lagrange Multiplier*. Dapat dilihat pada tabel 5, nilai prob adalah sebesar 0,2194 maka disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Lags	Prob
1	0,2194

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 12* (2026)

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, maka dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini layak untuk diuji. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian kelayakan model. Dalam penelitian, uji kelayakan model pada umumnya memberikan gambaran apakah model penelitian dapat menjelaskan atau mampu dalam mencerminkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai dari koefisien determinasi (R^2) dan uji F (Gani & Amalia, 2018).

Pada tabel 6 mengenai hasil pengujian kelayakan model, menunjukkan nilai dari koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9082 atau 90,82%. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini ketika menjelaskan perubahan pada variabel dependen adalah sebesar 90,82%. Sedangkan untuk uji F, nilai probabilitas menunjukkan besaran $0,0000 < 0,05$ maka dinyatakan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model

R-squared	Prob (F-statistic)
0,9082	0,0000

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 12* (2026)

Regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen yaitu pengangguran. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan pendekatan FEM pada data panel. Hasil menunjukan bahwa PDRB, TPAK dan upah dapat menekan jumlah pengangguran. Sedangkan pendidikan masih menunjukan hubungan positif. Secara statistik, hasil pengujian ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Prob
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,2600776	0,2194
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-0,1147886	0,0000
Upah Minimum Provinsi (UMP)	-2,0383295	0,0002
Rata-rata Lama Sekolah	0,7478011	0,0000
Tingkat Pengangguran Terbuka (Constanta)	11,2516401	0,0015

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 12* (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 11,2516401 - 0,2600776X_1 - 0,1147886X_2 - 2,0383295X_3 + 0,7478011X_4$$

Sehingga berdasarkan hasil persamaan diatas, maka didapatkan besaran konstanta senilai 11.25 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa jika seluruh variabel independen dalam model diasumsikan konstan atau tidak berkontribusi dalam perekonomian, maka tingkat pengangguran terbuka cenderung berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan realisasinya saat ini. Dimana sepanjang periode penelitian, nilai TPT di Indonesia sebenarnya hanya berkisar 4,7 persen sampai dengan 6,2 persen. Sehingga pemerintah perlu menjaga agar terjadi pertumbuhan pada PDRB, TPAK, Upah dan RLS.

Secara parsial, mayoritas variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengangguran. Pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai koefisien sebesar -0,26 dimana hasil tersebut menjelaskan bahwa setiap terjadi

kenaikan sebesar 1 persen PDRB maka akan mengurangi TPT sebesar 0,26 persen. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga berkontribusi menurunkan pengangguran dengan koefisien -0,11, yang berarti setiap peningkatan 1 persen TPAK akan mengurangi TPT sebesar 0,11 persen. Dampak penurunan terbesar ditunjukkan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan koefisien -2,03, di mana kenaikan 1 persen UMP diasumsikan dapat menekan TPT hingga sebesar 2,03 persen. Berbeda dengan ketiga variabel sebelumnya, Rata-rata Lama Sekolah justru menunjukkan arah pengaruh yang positif dengan koefisien sebesar 0,74. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap penambahan 1 tahun Rata-rata Lama Sekolah, TPT diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun arah koefisien PDRB terhadap TPT telah sejalan dengan teori pengangguran Keynesian, di mana pertumbuhan ekonomi idealnya diikuti oleh penurunan pengangguran, namun pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian (Daroini & Sriningsih, 2025) di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta (Yustika et al., 2024) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyatakan bahwa ekspansi PDRB cenderung mengurangi TPT secara tidak signifikan. Menurutnya, adanya fenomena ketimpangan (*mismatch*) antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, data Produk Domestik Bruto (PDB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih didominasi oleh sektor padat modal (*capital-intensive*) yang berbasis mesin dan teknologi tinggi, dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama, yang kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS, 2025). Akibatnya, peningkatan PDRB belum mampu menyerap akumulasi sumber daya manusia yang tersedia di pasar kerja secara optimal. Temuan tersebut juga diperkuat oleh (Prasetyo, 2021) dimana di Indonesia PDB tidak mempengaruhi tingkat pengangguran dan terdapat pola timbal balik pengangguran dan UMKM. Dimana pertumbuhan UMKM yang rendah dapat menghambat pengurangan tingkat pengangguran (Khalid, 2021; Prasetyo, 2021). Oleh karena itu, pemerintah direkomendasikan untuk memprioritaskan stimulus ekonomi pada sektor-sektor potensial yang bersifat padat karya (*labor-intensive*), seperti sektor konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta penguatan pada sektor UMKM guna meningkatkan elastisitas kesempatan kerja secara signifikan.

Berbeda dengan PDRB, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Temuan empiris ini mengonfirmasi relevansi Teori Pengangguran Keynesian dan sejalan dengan studi Salsabila *et al.* (2025) di lima Kabupaten Jawa Tengah yang menyatakan bahwa dinamika kenaikan TPAK berkorelasi langsung dengan penurunan TPT. Secara konseptual, kondisi ini terjadi karena peningkatan TPAK didorong oleh ekspansi jumlah angkatan kerja produktif, yang mencakup individu yang telah bekerja, individu yang sedang aktif mencari pekerjaan, maupun mereka yang sedang menunggu peluang kerja (Gatiningsih & Sutrisno, 2017).

Dinamika tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik, yang mencatat tren penguatan TPAK di Indonesia secara konsisten, yaitu dari 68,08% pada tahun 2021, meningkat menjadi 69,06% (2022), 69,30% (2023), 69,80% (2024), hingga mencapai 70,60% pada tahun 2025 (BPS, 2025). Kenaikan partisipasi angkatan kerja ini terbukti efektif dalam mengurangi TPT nasional. Guna mempertahankan stabilitas penurunan ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan akseleratif dalam penciptaan lapangan kerja pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja cepat, seperti sektor pertanian. Di samping itu, urgensi pengembangan sistem informasi pasar kerja digital di setiap provinsi menjadi penting untuk meminimalkan kendala informasi melalui penyediaan koneksi langsung antara pencari kerja dan penyedia lowongan kerja.

Dampak penurunan pengangguran yang serupa juga ditunjukkan oleh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Artinya, setiap kenaikan upah minimum justru diikuti oleh penurunan angka pengangguran. Hasil penelitian ini mendukung Teori Upah Efisiensi (*Efficiency Wage Theory*) serta sejalan dengan studi (Permadi & Chrystanto, 2021) di Jawa Timur yang menyimpulkan bahwa peningkatan upah minimum secara nyata mampu menekan laju pengangguran.

Secara logis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui fenomena modernisasi. Perkembangan zaman saat ini telah melahirkan berbagai profesi baru di bidang barang dan jasa yang mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari. Kehadiran profesi-profesi baru ini secara tidak langsung menciptakan tren pengeluaran dan gaya hidup baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika upah yang diterima masyarakat meningkat, daya beli dan konsumsi mereka terhadap produk-produk baru tersebut juga akan ikut meningkat (Permadi & Chrystanto, 2021). Peningkatan konsumsi ini memicu perputaran ekonomi yang lebih aktif di tingkat lokal, sehingga perusahaan atau penyedia usaha membutuhkan lebih banyak tenaga kerja baru untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, wilayah dengan tingkat upah yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah disarankan untuk menjaga stabilitas dan menyesuaikan upah minimum secara berkala. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi memberikan motivasi dan menjamin upah yang layak bagi pekerja, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perekonomian dalam mengurangi pengangguran.

Bertolak belakang dengan ketiga variabel sebelumnya, tingkat pendidikan yang dianalisis menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini berarti, semakin tinggi rata-rata lama sekolah atau tingkat pendidikan masyarakat, angka pengangguran terbuka cenderung mengalami kenaikan. Meskipun temuan ini bertolak belakang dengan asumsi umum Teori *Human Capital* yang mengasumsikan pendidikan tinggi menurunkan resiko pengangguran, namun hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Rahman & Riani, 2023) di 34 provinsi di Indonesia.

Secara empiris, temuan ini mengungkap bahwa fenomena ini terjadi akibat adanya kecenderungan selektivitas kerja di kalangan individu berpendidikan tinggi. Mereka umumnya menetapkan batasan upah minimum yang dapat diterima, serta hanya menerima pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sehingga, proses pencarian kerja berlangsung lebih lama dan pada akhirnya akan berkontribusi pada meningkatnya tingkat pengangguran (Rahman & Riani, 2023). Begitupula temuan (Esposito & Scicchitano, 2022) dimana fenomena lulusan yang berpendidikan dapat juga berisiko terjebak dalam perangkap pengangguran jika struktur ekonomi tidak membuka lapangan kerja pada tingkatan lebih tinggi.

Hal tersebut diperkuat dengan data Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi di Indonesia oleh BPS menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,63% di tingkat SMK dan 6,88% di tingkat SMK, diikuti lulusan perguruan tinggi mencapai 5,39%, sedangkan pada tingkat diploma I/II/III mencapai 4,31%. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tumilaar et al., 2022) di Kalimantan Timur dan (Prawira, 2018) di Indonesia.

Atas dasar temuan tersebut, pemerintah direkomendasikan untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di sektor formal demi mengoptimalkan penyerapan angkatan kerja terdidik dan lulusan perguruan tinggi. Sehingga pendidikan yang layak masih menjadi kebijakan untuk mengurangi pengangguran (Sileshi et al., 2024). Perluasan kesempatan kerja formal dapat dibangun dengan kerjasama pemerintah dengan dunia kerja dan perguruan tinggi ataupun sekolah kejuruan. Hal ini penting untuk memastikan angkatan kerja terdidik dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang stabil dan produktif, alih-alih terjebak dalam sektor pekerjaan tidak tetap atau tenaga kerja lepas (*freelance*).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada periode tahun 2018-2025. Berdasarkan hasil analisis, PDRB memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang menjelaskan bahwa peningkatan PDRB belum mampu menyerap akumulasi sumber daya manusia yang tersedia di pasar kerja secara optimal karena berdasarkan data PDB ADHK, pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor padat modal dengan kontributor utama adalah sektor industri pengolahan.

Kondisi tersebut berbeda dengan TPAK dan UMP yang secara nyata memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan TPAK mencerminkan semakin banyaknya jumlah angkatan kerja produktif yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan dapat menurunkan tpt secara nasional. Sejalan dengan hal itu, kenaikan UMP secara berkala terbukti efektif menurunkan TPT karena mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Kenaikan daya beli ini memicu perputaran ekonomi lokal yang lebih aktif, sehingga mendorong dunia usaha untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja baru guna memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, variabel tingkat pendidikan yang diproyeksikan dengan data RLS menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Penyebabnya adalah adanya kecenderungan selektivitas kerja di kalangan individu berpendidikan tinggi yang membuat proses pencarian kerja berlangsung lebih lama dan pada akhirnya akan berkontribusi pada meningkatnya tingkat pengangguran.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, adapun beberapa rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan PDRB dengan mendorong sektor padat karya seperti pertanian, konstruksi, dan perikanan serta sektor konstruksi yang banyak dalam menyerap tenaga kerja.
2. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan akseleratif dalam penciptaan lapangan kerja pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja cepat, seperti sektor pertanian. Di samping itu, urgensi pengembangan sistem informasi pasar kerja digital di setiap provinsi menjadi penting untuk meminimalkan kendala informasi melalui penyediaan koneksi langsung antara pencari kerja dan penyedia lowongan kerja.
3. Selain itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas upah minimum berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
4. Pemerintah direkomendasikan untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di sektor formal demi mengoptimalkan penyerapan angkatan kerja terdidik dan lulusan perguruan tinggi. Hal ini penting untuk memastikan angkatan kerja terdidik dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang stabil dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, B. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 171–182. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1183>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*.
- BPS. (2025). *Statistik Indonesia 2025*.
- Daroini, A. C., & Sriningsih, S. (2025). Studi Determinan PDRB, IPM, UMK Atas TPT di

- Provinsi NTB Untuk Periode 2017-2023. *Economics and Financial*, 7(1). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.1674>
- Esposito, P., & Scicchitano, S. (2022). Educational mismatch and labour market transitions in Italy: Is there an unemployment trap? *Structural Change and Economic Dynamics*, 61, 138–155. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.011>
- Fathul Muin, M. (2020). Analysis of Determinants of Unemployment Rate in Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(2), 145–162. <https://ssrn.com/abstract=3782865>
- Fitri, M. (2022). Efforts to Manage the Unemployment and Poverty Problems in Indonesia. *Proceedings of the 6th International Conference on Science, Education and Technology (ISET 2020)*, 574(Iset 2020), 447–451. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211125.083>
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data (Edisi Revisi)*.
- Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. In *Modul mata kuliah*.
- Harahap, K. (2024). *Buku Ajar Human Capital (I)*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Hartanto, T. B., & Masjkuri, S. U. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1).
- Hasan, Z., & Sasana, H. (2020). Determinants of youth unemployment rate in Asean. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6687–6691.
- Hawari, F. A., & Siregar, N. (2026). *Unemployment Dynamics in the Indonesian Economy*. 03(01), 20–28.
- Hawariyuni, W., & Andrasari, M. (2022). Role of Investment and Macroeconomic Variables on Unemployment in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 11(3), 321–328. <https://doi.org/10.15294/edaj.v11i3.52016>
- Khalid, W. (2021). The Relationship Between Unemployment and Economic Growth in South Africa: VAR Analysis. *Forman Journal of Economic Studies*, 17(01), 1–32. <https://doi.org/10.32368/fjes.20211701>
- Komlos, J. (2021). The Actual U.S. Unemployment Rate in 2019 Was Twice the Official Rate, and the Phillips Curve. *Challenge*, 64(1), 51–74. <https://doi.org/10.1080/05775132.2020.1863547>
- Lestari, I. D., & Nilasari, A. (2025). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. *Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 483–493.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macro Economics (Ninth Edition)*.
- Mukhyi, M. A. (2024). *Teori ekonomi (I)*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Permadi, E., & Chrystanto, E. (2021). Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. *Journal of Economics*, 5.
- Prasetyo, P. E. (2021). The Role of MSME on Unemployment in Indonesia Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Research Article. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(13), 2519–2525. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/8944%0Ahttps://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/download/8944/6965>
- Prawira, S. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. 1*.
- Rahman, N. A., & Riani, N. Z. (2023). Analisis Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5, 43–50.

- Salsabella, A. D., Hidayat, W., & Kusuma, H. (2020). Pengangguran Terbuka dan Determinannya di Indonesia Tahun 2013-2017. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 4, Number 2).
- Salsabila, A., Rahmatillah, A. E., Arwansa, D., Mukharohmah, M. S., & Septiani, Y. (2025). Dampak Upah Minimum, IPM, dan Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pengangguran: Analisis Data Panel Lima Kabupaten Jawa Tengah. *Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 245–260.
- Sihabudin, Wibowo, D., Mulyono, S., Kusuma, J. W., Arofah, I., Ningsi, B. A., Saputra, E., Purwasih, R., & Syaharuddin. (2021). *Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS*.
- Suhadi, F. R., & Setyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10, 879–888. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>
- Tamba, F. E., & Aprianti, Y. (2025). Analisis Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.36087/jrp.v8i1.300>
- Tumilaar, T. V., Th. B. Maramis, M., & F. Dj. Siwu, H. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22, 61–72.
- Wahyudi, Priyagus, & Kurniawan A, E. (2023). Pengaruh Investasi dan Upah serta Ekspor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. In *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* (Vol. 20, Number 1).
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*.
- Yoana, Auwalin, I., & Rumayya. (2024). The role of vocational education on unemployment in Indonesia. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2340858>
- Yustika, B. R., Ghofur Wibowo, M., Salsa Nur Savitri, A., & Ulil Albab Al Umar, A. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(2).